

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KELURAHAN SUKAPURA KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG

**Shintia Ceni Permata<sup>1)</sup>, Dadan Kurnia<sup>2)</sup>, Zaenal Abidin<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak

Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang mencakup 4 indikator, yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, studi pustaka, dan dokumentasi. Unit analisisnya adalah Kelurahan Sukapura Kota Bandung. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kasi Kesejahteraan Sosial, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat, RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Pendamping bantuan sosial pekerja sosial masyarakat dan penerima manfaat bantuan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi DTKS masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta lemahnya koordinasi antara pelaksana. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya proses verifikasi dan validasi data, sehingga penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran.

**Kata Kunci: Implementasi, DTKS, Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Publik**

## Abstract

*This research aims to describe and analyze the implementation of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) policy in Sukapura Urban Village, Kiaracondong District, Bandung City. The researcher uses a descriptive qualitative approach, applying George Edward III's policy implementation theory, which includes four indicators: 1) Communication, 2) Resources, 3) Disposition, and 4) Bureaucratic Structure. Data collection techniques include interviews, field observations, literature studies, and documentation. The unit of analysis is Sukapura Urban Village, Bandung City. Informants in this study consist of the Head of the Social Welfare Section, the Chairperson of the Community Empowerment Institution, the Community Self-Reliance Agency, neighborhood and community leaders (RT and RW), community figures, social assistance facilitators, social workers, and social assistance beneficiaries. The results of the study indicate that the implementation of DTKS still faces several obstacles, such as limited human resources, lack of public outreach,*

*and weak coordination among implementers. These issues affect the effectiveness of the verification and validation process, resulting in the social assistance distribution not fully reaching the intended targets.*

**Keywords: Implementation, DTKS, Social Welfare, Public Policy**

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial utama yang dihadapi oleh seluruh negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Persoalan kemiskinan di Indonesia sangat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, rendahnya pendapatan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta masalah-masalah ekonomi lainnya yang menghambat pembangunan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial dan politik secara nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kerangka pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu instrument penting dalam pelaksanaan program Kesejahteraan sosial adalah kebijakan sistem DTKS yang berfungsi sebagai basis data terpadu bagi berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Program sembako. Data dalam DTKS diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi di tingkat kelurahan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Sejarah implementasi DTKS di Indonesia dari langkah pemerintah untuk menyatukan penerima bantuan sosial yang sebelumnya dikelola secara terpisah oleh berbagai instansi. Sebelum tahun 2012 data untuk program seperti BLT, jaminan kesehatan masyarakat, dan raskin diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh BPS, namun data tersebut sering tidak akurat dan menimbulkan tumpah tindih penerima manfaat. Kemudian tahun 2012 pemerintah dimulai pembentukan Basis Data Terpadu (BDT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemudian pada

tahun 2015 pengelolaannya dialihkan ke Kementerian Sosial pada tahun 2019 resmi berganti nama menjadi DTKS. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 menjelaskan “DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.” dan ayat 14 menjelaskan “Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.” Namun saat ini penggunaan aplikasi digital seperti SIKS-NG telah meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan data, tetapi praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan.

Implementasi kebijakan sistem DTKS di Kelurahan Sukapura menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Meskipun sistem DTKS telah diterapkan, namun beberapa kendala masih sering terjadi seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM, serta koordinasi yang belum optimal. Kasus munculnya penerima bantuan dari luar wilayah domisili menunjukkan bahwa data masih persoalan mendasar. Angka kemiskinan merupakan suatu bentuk dari persentase penduduk rumah tangga yang berpenghasilan berada di bawah tingkat atau angka mutlak yang disebut garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan ialah suatu batas pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah dibawahnya keluarga dengan penghasilan secara hukum dikatakan miskin (Putri & Yeniwati, 2023),

Permasalahan implementasi juga muncul pada setiap aspek dalam teori implementasi kebijakan menurut George Edwar III, dari aspek komunikasi, masih terjadi kesalahpahaman antara pelaksana dan masyarakat terkait prosedur serta waktu distribusi bantuan. Dari aspek sumber daya, petugas pendataan masih membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan sistem informasi. Dari aspek disposisi, belum semua pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. Sedangkan aspek struktur birokrasi, perubahan kebijakan yang tidak tersosialisasi dengan baik menimbulkan kebingungan di kalangan penerima bantuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang diterapkan untuk mengkaji objek dalam kondisi asli, dimana peneliti berfungsi sebagai alat utama. Data dikumpulkan dengan cara melalui teknik trigulasi, analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021).

Instrumen utama dalam penelitian ini (Rawas, 2020) adalah peneliti sendiri dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data antara lain:

### **1) Wawancara**

Cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup interaksi secara langsung antara peneliti dan partisipan guna memperoleh pengetahuan mendalam mengenai pengalaman, pandangan serta pandangan individu terhadap peristiwa yang dipelajari. Wawancara dalam penelitian ini dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan.

### **2) Observasi**

Cara pengumpulan informasi data ini melibatkan pengamatan langsung untuk mempelajari interaksi sosial, perilaku dan konteks fenomena yang relevan dalam situasi alami maupun dalam lingkungan yang khusus dirancang untuk penelitian.

### **3) Dokumentasi**

Menggunakan dokumentasi tertulis seperti catatan, laporan dan buku memahami konteks cerita dan perkembangan terkait fenomena yang telah diteliti.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria keterlibatan langsung dalam proses implementasi kebijakan DTKS di tingkat kelurahan.

Unit analisis dalam penelitian ini (Anwar & Ati, 2020) adalah Kelurahan Sukapura sebagai pelaksana kebijakan DTKS. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Dilakukan dengan mencatat hasil penelitian di lokasi dalam bentuk uraian yang rinci, data tersebut disederhanakan, dirangkum dan dipilih bagian-bagian yang relevan, kemudian dianalisis untuk menemukan tema atau pola tertentu.

2) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan format uraian teks, penyusunan data diperoleh dari observasi, wawancara dan pengamatan.

3) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Setelah data disajikan dan dianalisis, peneliti menarik poin-poin penting mengenai pemberdayaan dan faktor-faktor penghambatnya. Kesimpulan ini menjadi acuan untuk menyusun rekomendasi dan kesimpulan akhir.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Para pelaksana harus memahami secara jelas apa yang harus dilakukan. Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa pesan atau informasi dari pembuatan kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana. Hal ini melibatkan aspek-aspek di bawah ini:

a. Kejelasan Penyampaian Informasi

Faktor penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami kebijakan DTKS dengan baik. Penyampaian informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, baik di tingkat pengelola maupun penerima manfaat. Dalam implementasi kebijakan DTKS di Kelurahan Sukapura, informasi telah disebarluaskan melalui berbagai media, seperti musyawarah kelurahan, pertemuan RT RW dan media sosial.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran dan perubahan data penerima bantuan. Sosialisasi yang belum merata, terutama kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, ketidakkonsistenan pencatatan data yang menyebabkan beberapa penerima yang tidak berhak masih mendapatkan bantuan sementara yang berhak terkadang terlewat.

b. Saluran komunikasi

Saluran komunikasi berperan dalam memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan DTKS dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh pihak yang terlibat. Dalam implementasi di Kelurahan Sukapura, komunikasi antara Dinsos, TKSK, kelurahan dan RT dan RW sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hambatan dalam distribusi informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa penggunaan teks dan media sosial sebagai saluran komunikasi utama, meskipun dalam beberapa kasus informasi yang disampaikan kurang jelas atau sulit dipahami oleh penerima manfaat. Musyawarah kelurahan dan pertemuan RT RW menjadi sarana utama dalam menyebarluaskan informasi secara langsung kepada masyarakat. Peran pendamping sosial dalam menyampaikan informasi secara langsung kepada penerima manfaat dan melakukan validasi data di lapangan.

c. Umpan balik

Umpan balik dari masyarakat bagian penting dalam evaluasi kebijakan dan perbaikan sistem DTKS. Respon masyarakat terhadap kebijakan ini sangat beragam, mulai dari apresiasi terhadap bansos hingga keluhan terkait keterlambatan, ketidaktepatan sasaran dan kurangnya kejelasan prosedur.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa terdapat beberapa mekanisme umpan balik yang telah berjalan, diantaranya peran pendamping sosial dalam menampung keluhan warga dan menyampaikan perbaikan data kepada keluhan. Mekanisme perbaikan data yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi penerima

manfaat. Keluhan masyarakat terkait kesulitan dalam menyampaikan aduan atau mencari informasi tambahan mengenai hak mereka dalam program DTKS.

## **2. Sumber daya**

Sumber daya mencakup berbagai hal yang dioptimalkan guna memenuhi kebutuhan maupun mewujudkan suatu tujuan, baik dalam bentuk material maupun non material. Syarat berjalannya suatu program di Kelurahan Sukapura adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Dalam suatu kebijakan, meskipun tujuannya sudah jelas dan logis, akan tetapi bukan hanya faktor tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian sistem DTKS, tetapi faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting, ketersediaan sumber daya salah satu faktor yang diperlukan dalam menjalankan sistem DTKS bansos perlu di perhatikan sumber daya terdiri dari:

### **a. Sumber daya manusia**

Dalam pelaksanaan kebijakan sistem DTKS di Kelurahan Sukapura, peran SDM sangat penting karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada kompetensi dan kapasitas petugas lapangan, petugas kelurahan, serta pihak terkait lainnya. Ketersediaan SDM yang terlatih dan memahami sistem DTKS menjadi faktor utama dalam memastikan validasi data serta kelancaran proses pendataan dan verifikasi. Tanpa dukungan SDM yang memadai, proses implementasi kebijakan akan terhambat, baik dalam hal kecepatan pelaksanaan maupun ketepatan data yang dihimpun.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa pendamping rutin mendapatkan pelatihan dari Dinsos, baik melalui workshop maupun online dengan materi terkait aturan program, verifikasi data dan pendampingan. Namun jumlah dan kualitas tenaga kerja pengelola data DTKS masih terbatas, sehingga meskipun ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, kekurangan tenaga kerja tetap menjadi hambatan dalam proses pendataan dan verifikasi.

### **b. Sumber daya finansial**

Memegang peran penting sebagai pendukung utama berbagai kegiatan. Anggaran diperlukan untuk memadai pelatihan petugas, pengadaan alat

pendataan, transportasi hingga pemeliharaan sistem teknologi yang digunakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, pelaksanaan program dapat terhambat, sehingga berdampak pada kualitas dan kecepatan pendataan serta verifikasi data masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa dana operasional untuk mendukung kebijakan DTKS sudah tersedia. Namun, dana ini terkadang masih kurang untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan.

#### c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mencakup perangkat teknologi seperti aplikasi SIKS-NG, komputer, jaringan internet, serta ponsel yang digunakan oleh petugas untuk mengelola dan memverifikasi data. Media sosialisasi seperti spanduk, brosur serta grup whatsapp dan media sosial juga dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain itu, tersedia ruang pelayanan di kantor kelurahan, lokasi musyawarah, serta gudang penyimpanan bansos untuk mendukung operasional program. Dari sisi infrastruktur ikeh server atau database terintegrasi serta kendaraan operasional bagi pendamping sosial dan petugas lapangan. Optimalisasi sasaran dan prasarana ini sangat penting untuk meningkatkan efektifitas pendataan, komunikasi, serta distribusi bansos agar program DTKS berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa implementasi kebijakan DTKS telah didukung oleh sarana dan prasarana seperti SIKS-NG, komputer, internet, media sosial serta ruang pelayanan dan gudang bansos. Namun, masih terdapat kendala dalam aksesibilitas teknologi, penyebaran informasi yangbbelum merata, serta keterbatasan SDM dan kendaraan operasional. Validasi dan pembaruan data masih menghadapi tantangan, menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem informasi serta perbaikan mekanisme pengaduan agar program DTKS lebih efektif dan tepat sasaran.

### **3. Disposisi**



Disposisi dalam implementasi kebijakan sistem DTKS merujuk pada komitmen serta kesediaan pihak-pihak terkait, seperti petugas kelurahan dan petugas lapangan dalam melaksanakan tugasnya. Disposisi yang baik ditandai dengan sikap tanggap, transparan dan akuntabel dari para pelaksana kepentingan terhadap proses pendataan dan verifikasi data. Dukungan dan koordinasi yang kuat antara pihak kelurahan serta instansi terkait lainnya juga menjadi penentu utama keberhasilan program ini. Tanpa disposisi yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun akan sulit diimplementasikan secara efektif. Ketersediaan disposisi salah satu faktor yang diperlukan dalam menjalankan sistem DTKS bansos perlu diperhatikan disposisi terdiri dari:

a. Komitmen

Komitmen yang tinggi diperlukan agar setiap tahapan, mulai dari pendataan hingga verifikasi dapat dilakukan dengan transparan, akurat dan tepat waktu. Selain itu, komitmen juga diperlukan dalam menjaga kesinambungan program dengan terus memperbarui data dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tanpa adanya komitmen yang kuat, implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa komitmen pendamping dalam implementasi kebijakan DTKS di Kelurahan Sukapura sangat tinggi, meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sarana dan waktu. Pendamping berupaya memastikan bantuan diberikan tepat sasaran dengan verifikasi data melalui RT RW dan cek lapangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas dengan usaha untuk mencegah penyalahgunaan bantuan. Meskipun ada hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi dengan RT RW memperkuat sistem pendataan dan penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, komitmen tinggi dari pendamping dan koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi DTKS.

b. Motivasi

Motivasi dalam implementasi kebijakan DTKS di Kelurahan Sukapura sangat penting untuk menjaga semangat kerja petugas dan aparat. Motivasi yang tinggi akan membuat mereka lebih cepat, teliti dan giat dalam

melakukan pendataan dan verifikasi. Motivasi ini bisa datang dari dukungan pimpinan, insentif dan lingkungan kerja yang baik. Jika motivasi rendah, pelaksanaan kebijakan bisa kurang efektif dan hasilnya tidak maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa yang memberikan informasi harus jelas, serta merespon keluhan dengan cepat. Selain itu, motivasi juga terlihat pada tindakan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun ada tantangan seperti keterlambatan atau kurangnya inisiatif, motivasi tetap ada untuk memperbaiki pelayanan dan memastikan program DTKS berjalan efektif.

#### c. Pemahaman

Pemahaman yang memadai dari para petugas kelurahan terhadap tujuan, prosedur, serta mekanisme sistem DTKS akan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemahaman yang baik juga mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pendataan dan verifikasi. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi kepada para pelaksana kebijakan menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman mereka. Tanpa ketersediaan pemahaman yang mencukupi, pelaksanaan kebijakan berpotensi tidak efektif dan menyulitkan tercapainya hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa yang diperoleh pemahaman terkait masalah seperti ketidakakuratan data yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran serta pemahaman mengenai kebutuhan masyarakat, menjadi dasar dalam upaya mencari solusi yang lebih tepat. Selain itu, pemahaman yang diperoleh melalui pelatihan dari dinsos juga berperan dalam meningkatkan kapasitas aparatur untuk mengelola data dan penyaluran bantuan secara lebih efektif. Adanya mekanisme yang jelas, seperti berita acara atau laporan, menunjukkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya dokumentasi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan

## **4. Struktur birokrasi**

Struktur birokrasi pengaturan dan pembagian tugas dalam suatu organisasi, khususnya dalam lembaga pemerintah atau perusahaan besar yang dirancang untuk menciptakan sistem yang efisien, terorganisir dan dapat dijalankan dengan cara yang sistematis, ketersediaan struktur birokrasi salah satu faktor yang diperlukan dalam menjalankan sistem DTKS banso perlu di perhatikan terdiri dari:

a. Standard Operating Procedure

SOP untuk struktur birokrasi adalah pedoman yang digunakan untuk menetapkan proses dan prosedur yang harus diikuti dalam suatu organisasi atau lembaga dengan tujuan memastikan bahwa setiap individu memahami peran, tanggung jawab dan prosedur yang harus diikuti dalam hierarki birokrasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa kurangnya SOP yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan musyawarah kelurahan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas proses pengambilan keputusan dalam penyaluran bansos. Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi ketidakadilan dalam distribusi bantuan, terutama ketika terdapat pengaruh faktor eksternal seperti politik yang dapat memengaruhi prioritas dan keputusan. Selain itu, ketidakonsistenan dalam menjalankan SOP yang telah ada memperburuk ketimpangan yang terjadi, karena proses menjadi kurang transparan dan sulit dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan konsistensi pelaksanaan SOP sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penyaluran bansos yang adil, efektif dan akuntabel.

b. Koordinasi

Koordinasi mengarahkan pada proses mengatur dan menyelaraskan aktivitas atau tindakan antara berbagai bagian atau unit dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi yang efektif mengurangi benturan, tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan membantu semua bagian organisasi bekerja secara harmonis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa koordinasi menjadi faktor kunci dalam memastikan akurasi dan kelayakan

data penerima bantuan serta kelancaran penyaluran bansos. Koordinasi yang erat antara satgas verival dan RT RW setempat, serta antara kelurahan dan instansi terkait, membantu meminimalkan kesalahan dalam pendataan dan memastikan informasi mengenai jadwal dan prosedur penyaluran bantuan tersampaikan dengan baik. Meski terdapat tantangan seperti keterlambatan atau kurangnya efektivitas dalam musyawarah kelurahan (muskel), koordinasi yang kuat dapat mencegah kesalahan, ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi bantuan. Sebaliknya, koordinasi yang buruk dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menghambat keadilan dalam proses penyaluran. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih efektif antar pihak yang terlibat, seperti DTKS, pendamping, RT RW dan tokoh masyarakat agar proses dapat berjalan optimal dan menghasilkan distribusi bantuan yang adil dan tepat sasaran.

#### c. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab kepada unit-unit atau individu-individu yang lebih rendah dalam hierarki organisasi. Ini memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan lapangan atau sumber masalah, memberikan lebih banyak otonomi kepada bagian yang lebih kecil dan lebih lokal, serta meningkatkan responsivitas organisasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan bahwa proses musyawarah kelurahan merupakan implementasi prinsip desentralisasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan di tingkat lokal dengan melibatkan berbagai pihak setempat. Proses ini memberikan otoritas kepada pihak lokal untuk menentukan penerima bantuan, sehingga seharusnya meningkatkan relevansi dan efektivitas program. Namun, tantangan muncul ketika terdapat pengaruh politik atau ketidakadilan yang mengganggu objektivitas keputusan. Faktor eksternal seperti ini dapat melemahkan prinsip desentralisasi dan menimbulkan ketidakadilan dalam penentuan penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lebih kuat untuk memastikan bahwa

proses muskel tetap transparan, objektif dan sesuai dengan tujuan desentralisasi yang efektif.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Sukapura masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dari aspek komunikasi, terdapat kesenjangan dalam penyampaian informasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat. Informasi terkait prosedur, jadwal pendataan, dan penyaluran bantuan sosial belum tersampaikan secara merata dan komprehensif. Akibatnya, sebagian masyarakat masih mengalami kebingungan atau keterlambatan dalam mengikuti proses yang telah ditentukan. Minimnya media komunikasi yang digunakan serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi turut memperbesar jarak informasi antara pemerintah dan warga.

Pada aspek sumber daya, hambatan yang paling menonjol adalah terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam proses verifikasi dan validasi data DTKS. Petugas pendata, baik di tingkat kelurahan maupun RT atau RW, seringkali belum mendapatkan pelatihan teknis yang memadai terkait pemutakhiran data dan penggunaan sistem digital. Selain itu, kekurangan sarana pendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan anggaran operasional turut memperlambat proses pembaruan data secara akurat dan berkelanjutan.

Dari aspek disposisi, tidak semua pelaksana kebijakan memiliki tingkat pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan tugasnya. Sebagian aparatur atau relawan pendata menunjukkan sikap yang pasif dan kurang inisiatif dalam memperbarui data, yang berimplikasi pada lambatnya penyesuaian data DTKS dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis. Ketidadaan insentif yang memadai juga dapat memengaruhi motivasi kerja petugas di lapangan.

Sementara itu, dalam aspek struktur birokrasi, permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan lemahnya koordinasi lintas sektor dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Terkadang terdapat perbedaan pemahaman antar lembaga terkait mengenai alur pelaksanaan pemutakhiran data dan kriteria penerima manfaat, yang menyebabkan kebingungan dalam implementasi di tingkat bawah. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program belum berjalan secara sistematis dan terstruktur, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penyempurnaan SOP yang jelas dan seragam, penguatan koordinasi antar lembaga pelaksana, serta penerapan pendekatan partisipatif dalam proses pendataan agar masyarakat lebih terlibat aktif. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan sistem DTKS di Kelurahan Sukapura dapat lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV. syakir media PRESS.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=vDEBuZ-bSZ&sig=KCLvhGS50NK5Z86NxZFzLuUdJZA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=metode penelitian kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=vDEBuZ-bSZ&sig=KCLvhGS50NK5Z86NxZFzLuUdJZA&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif&f=false)
- Anwar, D. P., & Ati, N. U. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ( Bpnt ) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 1–7.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 22 (2021).
- Putri, N., & Yewiwati, Y. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial dan Zakat terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 110–117.
- Rawas, K. M. (2020). Universitas Musi Rawas. *Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JISPSK)*, 5(1), 59–68.